

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pengelolaan Keuangan pemerintah di Indonesia sendiri sudah ada semenjak pada masa lampau. Dalam pemerintahaan, dari sebelum merdeka sampai sekarang, tentunya mempunyai pengelola keuangan dan kekayaan untuk memastikan dan mengatur keuangan di pemerintahannya. Agar berjalannya pembangunan ekonomi maka harus disertai dengan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara dilakukan atas dana yang diperoleh dari masyarakat, seperti pajak, bea cukai, dan sebagainya. Kementerian keuangan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai peran hakiki dalam negara Indonesia yaitu, dalam mengelola keuangan, dan kekayaan negara. Dari tugas, dan kewajiban yang harus dijalankan kementerian keuangan dilambangkan dengan Nagara Dana Rakca.



Gambar 2.1. 1 Logo Kementerian Keuangan RI

Pada gambar 2.1.1 terdapat logo dari Kementerian Keuangan, logo tersebut memiliki bentuk segi lima dan memiliki warna biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih, dan hijau. Dalam logo tersebut, terdapat padi dengan panjang 17 butir, kapas dengan panjang 8 butir, terdiri dari empat buah berlengkung empat dan empat buah berlengkung lima, terdapat sayap, dan

gada. Dari gambar lukisan yang terdapat pada logo memiliki arti tersendiri, sebagai berikut:

- a. Padi dan Kapas: melambangkan cita-cita dan upaya untuk menjaga kesejahteraan bangsa dan memiliki arti sebagai tanggal lahir Negara Republik Indonesia.
- b. Sayap: ketagkasan dalam melaksanakan tugas.
- c. Gada: daya upaya dalam mengerahkan, dan mengamankan keuangan negara.
- d. Segi lima: dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dari ke-empat arti tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari keseluruhan logo kementerian keuangan merupakan daya dan upaya yang dapat menyatukan dalam gerak kerja, dan menjalankan tugas kementerian keuangan. Selain menjalankan tugas kementerian keuangan telah berpartisipasi dalam pelestarian bangunan cagar budaya Indonesia.



Gambar 2.1. 2 Gedung A.A Maramis

Pada gambar 2.1.2 terdapat Gedung A.A Maramis, Gedung A.A Maramis adalah gedung monumental yang di bangun pada 7 Maret 1809 atas Prakarsa Gubernur Jendral Hindia Belanda yang Bernama Herman Willem Daendels. Gedung A.A Maramis dibuat untuk mengalihkan istana Batavia ke wilayah pusat ibu kota baru di Weltevreden. Gedung A.A Maramis diresmikan pada tahun 1828 oleh Jenderal L. Saat tahun 1828 sampai tahun 1942 pada saat kekuasaan jepang,

Gedung A.A Maramis diserahkan kepada Negara Republik Indonesia pada tahun 1950, dan dijadikan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. A.A Maramis merupakan Menteri Keuangan Indonesia. Untuk menghargai jasa yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan pertama Indonesia, gedung *Department of Financien* dinamai dengan Gedung A.A. Maramis. Gedung A.A. Maramis merupakan pusat kerja Menteri Keuangan, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang membahas Cagar Budaya, maka gedung A.A. Maramis dimasukkan kedalam cagar Budaya yang wajib dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan.



Gambar 2.1. 3 Gedung Kementerian Keuangan RI (Gedung Djuanda I)

Pada gambar 2.1.3 merupakan sebuah foto dari gedung Menteri Keuangan Republik Indonesia dipindah ke Gedung Djuanda I yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, Indonesia.

2.1.1 Visi Misi

2.1.1.1 Visi Kementerian Keuangan

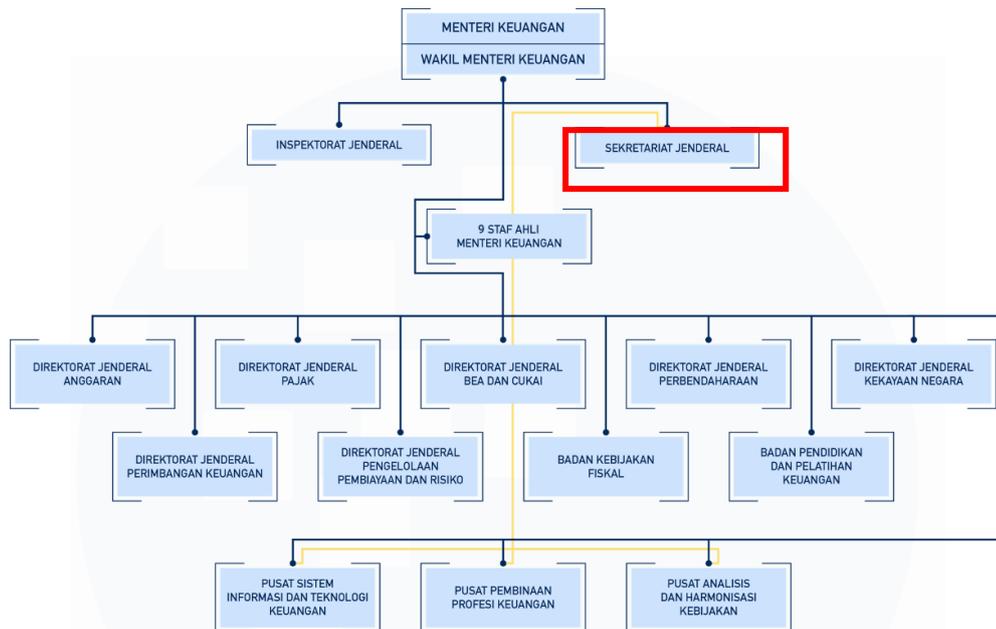
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

2.1.1.2 Misi Kementerian Keuangan

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang *inovatif* dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

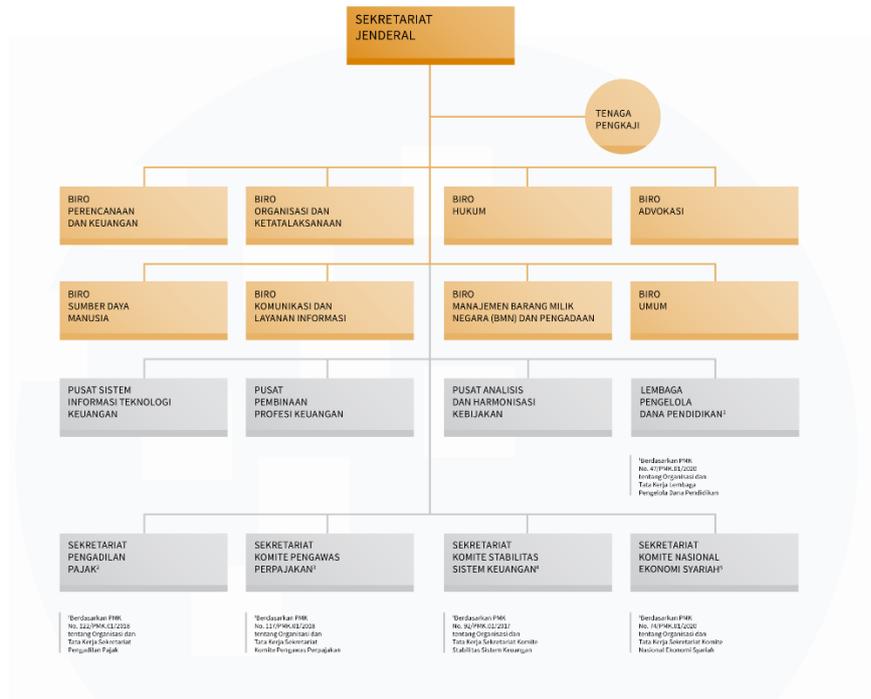
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi Kementerian Keuangan Terdiri atas:



Gambar 2.2. 1 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan RI

Pada gambar 2.2.1 merupakan struktur organisasi keseluruhan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia saat ini adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. dan Wakil Menteri Keuangan Indonesia saat ini adalah Bapak Suahasil Nazara. Dibawah Menteri dan Wakil Menteri terdapat Unit Eselon I yang berisikan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dengan 9 Staf ahli Menteri Keuangan yaitu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Unit Eselon I ini memiliki kewajiban untuk membantu proses kerja Menteri Keuangan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



Gambar 2.2. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Peserta magang melakukan pelaksanaan kerja magang pada bagian Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk membantu pengorganisasian dalam pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi untuk seluruh organisasi di lingkungan Kemenkeu. Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1) Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, mengelola dan analisis kinerja dan risiko dari Kementerian Keuangan, serta melakukan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

2) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, jabatan fungsional, dan tata laksana semua satuan organisasi di lingkungan kemenkeu.

3) Biro Hukum

Biro Hukum memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan, memberikan peraturan dan menandatangani *legal opinion* serta memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.

4) Biro Advokasi

Biro Advokasi memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan advokasi hukum yang meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum, penelaahan kasus hukum, serta mempertimbangkan hukum yang berkaitan dengan kementerian.

5) Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja Kementerian Keuangan.

6) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan dan manajemen humas di lingkungan kerja Kementerian Keuangan.

7) Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan administrasi barang pengadaan dan milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

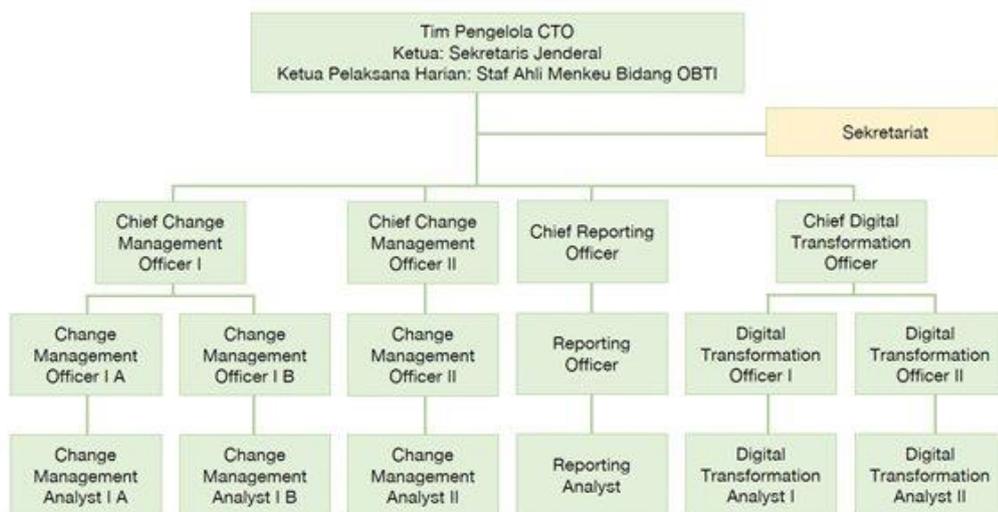
8) Biro Umum

Biro Umum memiliki tugas untuk membantu mengoordinasikan dalam pelaksanaan tatausaha dan pemberian pelayanan pelaksanaan dari tugas kantor pusat Kementerian Keuangan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Jenderal sesuai bidang keterampilan.

Selain dari 9 bagian dari Sekretariat Jenderal diatas, terdapat satu bagian yang bernama *CTO (Central Transformation Office)*. *CTO (Central Transformation Office)* dibentuk unruk memastikan, mengawali implementasi strategis yang telah diputuskan dalam program Transformasi Kelembagaan. *CTO* bertugas pada lingkup Kementerian.



Gambar 2.2. 3 Struktur Organisasi *Centrall Transformation Office*

Pada gambar 2.2.3 merupakan struktur organisasi dari *CTO*. Ketua pelaksana dari *CTO* merupakan staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan diketuai oleh Sekretariat Jenderal. Pada bagian *CTO* terdapat anggota sebanyak 16 orang.